

**PERAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

Dhiandra Pasha Valencia¹, Hari Nur Cahya Murni²
NPP. 32.0849

Asdaf Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan

¹Email: dpashavalencia462@gmail.com ²Email: yasminenaurahizari@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study discusses the role of women's representation in the Village Consultative Body in Tompudau Village, Tinangkung District, Banggai Islands Regency, BPD members in Tompudau Village are 5 people with one female member in the BPD who has not met 30% female representation but can carry out their duties and obligations well in the BPD. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the role of women's representation in the BPD in Tompudau Village and to determine the supporting and inhibiting factors of the role of women's representation when carrying out their duties in the BPD Tompudau, Tinangkung District, Banggai Islands Regency. **Method:** The research method used in this study uses a qualitative method with data collection techniques of observation, interviews and documentation studies. This study was analyzed using Role Theory according to Biddle and Thomas in (Sarwono 2015) which has 5 dimensions, namely Expectations, Norms, Behavioral Forms, Assessments and Sanctions. **Results:** The results of the study show that women can play a good and responsible role in carrying out their duties in the Tompudau BPD with several supporting factors such as good internal relations of the BPD and the role of leaders and community figures who support, as well as social and cultural changes towards patriarchy. However, there are still several obstacles in some communities such as the lack of family and community support and the dual role of women who are also housewives which hinders a woman from participating in the political arena. **Conclusions:** The conclusion and suggestions of this study is that the role of women still needs to be more optimal in carrying out their duties so that the performance of BPD will be better in the future and be able to face inhibiting factors that exist in society and in the work environment.

Keywords: Role, Women's Representation, BPD

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas tentang peran keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, anggota BPD di Desa Tompudau berjumlah 5 orang dengan perwakilan satu anggota perempuan di BPD yang belum memenuhi 30%

keterwakilan perempuan namun dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik di BPD. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran keterwakilan perempuan di BPD di Desa Tompudau dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran keterwakilan perempuan saat menjalankan tugasnya di BPD Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Peran menurut Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2015) yang mempunyai 5 dimensi yaitu Harapan, Norma, Wujud Perilaku, Penilaian dan Sanksi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan perempuan dapat berperan dengan baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya di BPD Tompudau dengan beberapa faktor yang mendukung seperti hubungan internal BPD yang baik dan peran pemimpin dan tokoh masyarakat yang mendukung, serta perubahan sosial dan budaya terhadap patriarki. Tetapi masih terdapat beberapa penghambat di sebagian lingkungan masyarakat seperti kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dan peran ganda perempuan yang juga seorang ibu rumah tangga yang menghambat seorang perempuan untuk berpartisipasi di ranah politik. **Kesimpulan:** Kesimpulan dan saran penelitian ini yaitu peran perempuan yang masih harus lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat kinerja BPD menjadi lebih baik kedepannya dan mampu menghadapi faktor penghambat yang ada di masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan.

Kata Kunci: Peran, Keterwakilan Perempuan, BPD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menangani berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan seluruharganya. BPD berperan sebagai lembaga legislatif dan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sejajar dengan pemerintah desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan (Adnyana & Suprpta, 2021). Kondisi yang kondusif menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan pembangunan, termasuk di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan manajemen desa yang lebih baik dan berpartisipasi (Suhardi, 2015).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai wadah untuk menerapkan prinsip demokrasi di tingkat desa. Dalam struktur pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mewakili masyarakat desa dalam berbagai proses pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan mereka bisa dipilih kembali hingga tiga periode berikutnya. Jumlah anggota BPD harus berjumlah ganjil, dengan minimal 5 anggota dan maksimal 9, yang ditentukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta kondisi keuangan desa (Edrial et al., 2021)

Meskipun perempuan di Desa Tompudau sudah mempunyai anggota perempuan, namun anggota perempuan hanya satu dari lima anggota BPD. Keterwakilan perempuan baru mencapai 20% dari kebijakan 30% minimal jumlah presentase perempuan di lembaga legislatif (Ruriana et al., 2023). Penelitian (Patel et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan meningkat dalam lembaga lokal, ekspektasi budaya dan beban kerja ganda sering membatasi ruang aktualisasi perempuan dalam fungsi legislatif desa.

Oleh karena itu, berbagai masalah konkret dapat muncul, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat desa. Kurangnya representasi perempuan sering kali menyebabkan perspektif perempuan terabaikan dalam proses perumusan kebijakan desa, sehingga berdampak langsung pada masalah-masalah seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan (Martini et al. 2024). Studi (Fitriani et al., 2020) mengungkapkan bahwa dominasi maskulinitas dalam lembaga seperti BPD menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa yang sensitif gender, terutama selama masa krisis seperti pandemi.

Ketidakseimbangan ini juga mempersempit peluang perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, karena mereka tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam perencanaan desa. (Ragsdale et al., 2022) menekankan bahwa pembangunan kemitraan strategis dengan organisasi pembangunan berbasis lokal dapat memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, namun tetap dibutuhkan penguatan kelembagaan yang mendorong legitimasi perempuan sebagai aktor politik setara.

Selain itu, keterwakilan perempuan yang rendah memperkuat stereotip gender di masyarakat yang menganggap pengambilan keputusan adalah ranah laki-laki, sehingga mempersulit perempuan untuk berani terjun ke ranah kepemimpinan. Secara lebih luas, (Assefa et al., 2021) dalam studinya menyoroti bahwa ketidakterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan lokal menyebabkan kebijakan publik tidak responsif terhadap kebutuhan dasar perempuan, terutama di sektor kesehatan, air bersih, dan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa representasi kuantitatif perempuan perlu diiringi dengan kekuatan untuk mempengaruhi substansi kebijakan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tanpa keterlibatan perempuan yang memadai, keputusan yang diambil oleh suatu lembaga cenderung tidak mewakili kepentingan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang dapat menciptakan ketimpangan dan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya (Pitkin, 1972). Kurangnya peran perempuan dalam BPD juga berpotensi membuat kebijakan desa menjadi kurang responsif terhadap dampak spesifik yang dirasakan oleh kelompok perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai adanya anggota perempuan dalam keanggotaan BPD juga dilatar belakangi upaya untuk mewujudkan persamaan hak perempuan dalam politik. Disebutkan juga dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Desa bahwa BPD mencerminkan perwakilan unsur-unsur atau kelompok-kelompok dalam masyarakat desa dan secara spesifik dikatakan jelas termasuk kuota 30% untuk kaum perempuan. dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 dimana pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah 1 (satu) orang perempuan yang hal ini tentu belum mencapai angka 30%.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah memberikan pandangan atau ide yang berharga bagi penulis dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu ini penulis gunakan sebagai referensi, perbandingan, atau sebagai dasar pemilihan topik. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muhliza yang berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Studi Desa Tabbinjai Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, meskipun kuotanya tidak mencapai 30%. Minimnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sistem pemilihan yang terkesan tertutup, tingkat pendidikan

dan pilihan untuk fokus pada profesi lain (Muhliza et al., 2023). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ani Martini, Michael Wutoy dan Perdana Dewi Wardhani yang berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sukoharjo untuk periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti tingkat kepercayaan diri perempuan, jaringan sosial, beban ganda, dan biaya politik. Selain itu, ada juga faktor eksternal seperti budaya patriarki dan hambatan politik yang turut menghambat keterwakilan perempuan (Martini et al., 2021). Ketiga, penelitian yang dilakukan (Huda, 2014) yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Magetan). Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah UU No 8 Tahun 2012 telah diterapkan, hasilnya masih belum optimal. Beberapa partai politik masih belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, dan perempuan sering kali hanya ditempatkan untuk memenuhi kuota tanpa diberikan posisi strategi.. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Meniwati Ndruru yang berjudul Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Partisipasi Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Orahili Kecamatan Ulunoyo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di BPD Desa Orahili belum memenuhi persyaratan . meskipun tidak ada hambatan struktural yang melarang perempuan, partisipasi perempuan dalam pencalonan sangat rendah karena kurangnya perempuan yang berminat mencalonkan diri. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa (Ndruru, 2022). Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Nursyamsiah & Tomi, 2024) yang berjudul "Peranan Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan (Studi di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)". Penelitian ini mengkaji implementasi keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Desa Makrampai dan faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris, penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan dalam pembangunan desa sudah cukup signifikan melalui partisipasi dalam organisasi yang didominasi perempuan seperti PKK, Posyandu, kelompok pengajian, Kelompok Tani, dan kelompok Persatuan Hajatan. Namun, penyampaian pendapat dan perjuangan aspirasi kaum perempuan di desa masih dianggap lemah dan hanya sebagai bagian pelengkap dalam anggota BPD. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari anggota BPD yang masih kurang memahami secara detail tentang rincian tugas dari keterwakilan perempuan tersebut. Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi minimnya pengetahuan anggota keterwakilan perempuan dalam BPD, kurangnya koordinasi kepada masyarakat, dan belum adanya kegiatan khusus untuk peningkatan kapasitas maupun pembinaan bagi anggota keterwakilan perempuan dalam BPD. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman peran keterwakilan perempuan dalam BPD untuk dapat memperjuangkan kepentingan perempuan secara efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kebaruan dalam beberapa aspek yang belum terdapat pada penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa rendahnya peran keterwakilan perempuan bukanlah akibat dari regulasi yang membatasi, seperti faktor internal masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran perempuan sedangkan penelitian ini faktor yang mempengaruhi dari regulasi yang membatasi. Kedua, penelitian ini membahas peran seorang perempuan pada tingkatan lebih rendah yaitu desa yang terletak di kabupaten yang berbatasan langsung dengan ibukota kabupaten.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran keterwakilan perempuan di BPD Desa Tompudau dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD di Desa Tompudau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang sesuai dengan penelitian yang Peneliti lakukan, Penelitian kualitatif bersifat fleksibel atau dapat disesuaikan, sehingga memungkinkan peneliti mengubah rencana awal sesuai dengan kondisi atau fenomena nyata yang ditemui di lokasi penelitian (Simangunsong, 2017). Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan menuangkannya secara sistematis aktual dan akurat (Hanurawan, 2016). Data yang dikumpulkan ada dua yaitu data primer dan sekunder, sumber data adalah semua informasi yang berhubungan dan penting untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, dari data yang didapatkan akan ditarik kesimpulan mengenai Keterwakilan Perempuan pada BPD di Desa Tompudau. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tompudau sangat vital dalam menciptakan keseimbangan dan keberagaman dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Keberadaan perempuan dalam BPD memberikan perspektif yang berbeda, terutama dalam hal permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak. Perempuan yang terpilih sebagai anggota BPD berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan di tingkat desa, serta memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dan diperhatikan dalam setiap kebijakan desa.

3.1 Peran Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Tompudau

3.1.1 Expectation (Harapan)

Harapan merupakan salah satu indikator penting dalam peran suatu lembaga. Harapan besar masyarakat terhadap peran perempuan di BPD, baik saat ini maupun di masa depan. Saat ini, masyarakat menginginkan perempuan di BPD untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan perempuan. Harapan masyarakat saat ini menunjukkan bahwa saat ini, anggota perempuan di BPD telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan desa lainnya seperti penyusunan kebijakan pembangunan desa dan penyusunan anggaran desa. Oleh karena itu, masyarakat berharap peran perempuan di BPD bisa lebih diperkuat dari segi kontribusinya di pemerintah desa.

3.1.2 Norm (Norma)

Norma budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Di banyak desa, norma budaya yang berlaku seringkali membentuk peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Kehadiran perempuan di BPD sangat penting karena mereka membawa perspektif yang berbeda, terutama dalam hal isu-isu sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pemberdayaan keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah desa melihat bahwa perempuan sering kali lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan

serta aspirasi mereka dengan lebih jelas. Kepala Desa juga menekankan bahwa perempuan di BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat inklusif, adil, dan memperhatikan kepentingan semua pihak.

3.1.3 Performance (Wujud Perilaku)

Performance dalam konteks ini mengacu pada wujud perilaku atau hasil yang ditunjukkan oleh perempuan yang tergabung dalam BPD, baik dalam kapasitas mereka sebagai anggota BPD maupun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di masyarakat. Ketua BPD menjelaskan bahwa kinerja perempuan di BPD terlihat dari peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang inklusif, dan kegiatan di desa lainnya dimana menunjukkan peran anggota perempuan yang aktif di setiap kegiatan di desa. BPD disini mengidentifikasi adanya hubungan kerja sama antara BPD dan masyarakat agar tersampainya aspirasi dengan baik. BPD juga sering melakukan kunjungan lapangan untuk lebih memahami kondisi masyarakat secara langsung, termasuk mendengarkan masalah yang dihadapi oleh warga dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya menunggu informasi dari laporan, tetapi juga berusaha turun ke lapangan untuk merasakan dan memahami masalah secara langsung.

3.1.4 Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)

Evaluasi dan sanksi terhadap peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggota perempuan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Usaha untuk mempertahankan nilai positif dari BPD telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Keterbukaan dalam musyawarah desa dan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan bersama dan transparan. Hal ini mencerminkan upaya BPD untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Sanksi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap kewajiban atau peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam hal ketidakhadiran dalam rapat, ketidakaktifan dalam pengambilan keputusan, atau pelanggaran lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan tujuan pembangunan desa. Sanksi diberikan mampu membuat anggota BPD memperbaiki kinerja anggota BPD dan memastikan bahwa tugas mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab, demi kepentingan masyarakat desa.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Keterwakilan Perempuan

Faktor pendukung peran keterwakilan perempuan pada BPD ada tiga. Pertama, Hubungan internal BPD yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peran keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan yang harmonis, inklusif, dan saling mendukung akan menciptakan suasana yang memungkinkan perempuan untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kedua, Peran tokoh masyarakat dan pemimpin desa sangat penting dalam mendukung keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Para tokoh masyarakat dan pemimpin desa bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam semua aspek pemerintahan desa, agar suara mereka didengar dan keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Ketiga, Perubahan sosial dan budaya adalah salah satu faktor penting yang mendukung peran keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Desa Tompudau sangat mendukung peran perempuan di BPD.

Kesadaran tentang kesetaraan gender, peningkatan akses pendidikan, dukungan dari tokoh masyarakat dan pemimpin desa, serta perubahan dalam norma sosial yang menghargai kontribusi perempuan. Faktor penghambat peran keterwakilan perempuan ada tiga. Pertama, Hambatan dalam proses pemilihan merupakan faktor signifikan yang menghambat keterwakilan perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Beberapa faktor yang cukup signifikan, seperti diskriminasi dalam pencalonan, keterbatasan sumber daya finansial, peran domestik yang membebani perempuan, serta pandangan tradisional yang cenderung menganggap laki-laki lebih layak memegang posisi politik. Kedua, peran ganda pada perempuan, peran ganda ini seringkali mempengaruhi persepsi masyarakat. Masih ada anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk mengurus rumah tangga daripada terlibat dalam politik. Ketiga, kurangnya dukungan keluarga, terdapat tantangan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan dukungan dari keluarga untuk terlibat dalam kegiatan politik. Pernyataan dalam wawancara ini juga sangat relevan, karena menunjukkan bahwa kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan perempuan kesulitan untuk menyeimbangkan peran domestik dan publik.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muhliza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, meskipun kuotanya tidak mencapai 30%. Minimnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sistem pemilihan yang terkesan tertutup, tingkat pendidikan dan pilihan untuk fokus pada profesi lain. Adapun persamaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu melakukan penelitian tentang Badan Permusyawaratan Desa dan perempuan. Adapun perbedaan penelitian ini dan sebelumnya adalah tempat penelitian sebelumnya di Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan fokus penelitian ke keterwakilan perempuan dalam syariat islam sedangkan penelitian ini bertempat di desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Banggai Kepulauan dan fokus penelitian hanya pada peran keterwakilan perempuan di BPD.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ani Martini, Michael Wutoy dan Perdana Dewi Wardhani. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sukaharjo untuk periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti tingkat kepercayaan diri perempuan, jaringan sosial, beban ganda, dan biaya politik. Selain itu, ada juga faktor eksternal seperti budaya patriarki dan hambatan politik yang turut menghambat keterwakilan perempuan. Adapun persamaan penelitian ini dan sebelumnya adalah untuk memahami dan menganalisis kurangnya dukungan yang memengaruhi kinerja anggota legislatif. Sedangkan, Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan di badan legislatif DPRD sedangkan penelitian ini fokus pada peran keterwakilan perempuan di BPD.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Huda, 2014). Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah UU No 8 Tahun 2012 telah diterapkan, hasilnya masih belum optimal. Beberapa partai politik masih belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, dan perempuan sering kali hanya ditempatkan untuk memenuhi kuota tanpa diberikan posisi strategis. Adapun Persamaan penelitian ini dan sebelumnya adalah untuk mengetahui penyebab minimnya perempuan dalam lingkungan politik yang belum memenuhi 30% jumlah perempuan di badan legislatif. Sedangkan, Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik di kabupaten Magetan. Penelitian ini membahas faktor keterwakilan perempuan di tingkat desa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Meniwati Ndruru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di BPD Desa Orahili belum memenuhi persyaratan. meskipun tidak ada hambatan struktural yang melarang perempuan, partisipasi perempuan dalam pencalonan sangat rendah karena kurangnya perempuan yang berminat mencalonkan diri. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Adapun Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sejalan dengan temuan umum mengenai kendala keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah desa di banyak wilayah, di mana faktor sosial dan budaya sering kali menghambat partisipasi perempuan secara efektif. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu penelitian ini mengidentifikasi bahwa di Desa Orahili, rendahnya keterwakilan perempuan bukanlah akibat dari regulasi yang membatasi, melainkan faktor internal masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran perempuan sedangkan penelitian ini faktor yang mempengaruhi dari regulasi yang membatasi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsiah & Tomi. Penelitian ini mengkaji implementasi keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Desa Makrampai dan faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris, penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan dalam pembangunan desa sudah cukup signifikan melalui partisipasi dalam organisasi yang didominasi perempuan seperti PKK, Posyandu, kelompok pengajian, Kelompok Tani, dan kelompok Persatuan Hajatan. Persamaan Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman peran keterwakilan perempuan dalam BPD untuk dapat memperjuangkan kepentingan perempuan secara efektif. Sedangkan, perbedaannya penelitian Nursyamsiah & Tomi menggunakan pendekatan sosiologis empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan induktif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti mengenai Peran Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Keterwakilan Perempuan pada BPD sebagai lembaga perwakilan desa harus lebih dioptimalkan lagi. Berdasarkan dimensi pertama yaitu Expectation (Harapan) menjelaskan bahwa anggota perempuan di BPD cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan desa lainnya. Dimensi kedua Norm (norma) menjelaskan bahwa norma budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perempuan, norma yang berlaku membentuk peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Dimensi ketiga, Performance (wujud perilaku), kinerja perempuan di BPD menunjukkan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang inklusif, BPD disini menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara BPD dan masyarakat agar tersampainya aspirasi dengan baik. Dimensi yang keempat, Evaluation (penilaian) dan Sanction (sanksi) menunjukkan bahwa anggota BPD termasuk perempuan harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan untuk memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan desa. untuk mempertahankan nilai positif, BPD juga terus memperkuat hubungan dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Peran Keterwakilan Perempuan pada BPD di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

- (1). Faktor Pendukung

- a. Hubungan Internal BPD yang Baik
- b. Peran Tokoh Masyarakat dan Pemimpin Desa
- c. Perubahan Sosial dan Budaya

(2). Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peran Keterwakilan Perempuan pada BPD di Desa Tompudau meliputi:

- a. Hambatan Dalam Proses Pemilihan
- b. Peran Ganda Pada Perempuan
- c. Kurangnya Dukungan dari Keluarga

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian yang dapat mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman data. Masyarakat yang menjadi sumber informan sulit didatangi sehingga menghambat untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini dan jangkauan penelitian yang belum luas. Penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan studi komparatif pada beberapa desa lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mengidentifikasi pola umum dan perbedaan lokal pada peran keterwakilan perempuan. Lakukan kajian jangka panjang untuk melihat pola dinamika dan perubahan tingkat partisipasi perempuan dalam beberapa periode waktu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada pihak BPD di Desa Tompudau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu dalam memberikan informasi, kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta semangat selama proses penyusunan skripsi. Kepada keluarga khususnya orang tua yang selalu memberikan dukungan dan perhatian selama proses penyusunan dan penulisan skripsi dan seluruh pihak yang memberikan dukungan pada penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, P. D., & Suprpta, I. N. (2021). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Lembaga Demokrasi Desa Di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(1), 73–87. <https://doi.org/10.37637/locus.v13i1.709>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Assefa, G. M., Sherif, S., Sluijs, J., Kuijpers, M., Chaka, T., Solomon, A., Hailu, Y., & Muluneh, M. D. (2021). Gender equality and social inclusion in relation to water, sanitation and hygiene in the oromia region of ethiopia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph18084281>
- Edrial, Nurhidayati, S., & Sumantri, A. (2021). Penguatan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsinya Di Desa Batu Bangka. *Jurnal Kapita Seleksi Administrasi Publik*, 2(72), 69–79. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i1.13804>
- Fitriani, D., Shauki, E. R., & Pratiwi, S. C. (2020). Village fund accountability and gendering in Masculine Hegemonic Institution: A study during COVID-19. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/ajce.v4i2.1106>

- Hanurawan, F. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Rajawali Pers.
- Huda, M. S. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(2), 319–324. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/319>
- Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 14–22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>
- Martini, A., Lambelanova, R., Murni, H. N. C., & Sentosa, I. (2024). Actualizing equality: A strategy for women's political representation in politics in the 2024 elections in the Special Province of Yogyakarta. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 198-213. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i2.56970>
- Muhliza, N., Risal, M. C., & Umar, K. (2023). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 4(3), 294–310. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/28938>
- Ndruru, M. (2022). KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UPAYA PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Orahili Kecamatan Ulunoyo). *Jurnal Panah Keadilan*, 16(1), 1–23. <https://doi.org/10.14710/jpgs.v12i3.39423>
- Nursyamsiah, & Tomi. (2024). Peranan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dalam memperjuangkan kepentingan perempuan: Studi di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 2(3), 314-323. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.687>
- Patel, T., Romani, L., Oberoi, P., & Ramasamy, C. (2023). Gender role encapsulation as resistance to patriarchy: Women politicians' work and gender equality in India. *Organization*, 30(2), 307–325. <https://doi.org/10.1177/1350508421995764>
- Pitkin, H. (1972). *Hanna F Pitkin The Concept of Representation*. University of California Press.
- Ragsdale, K., Read-Wahidi, M., Marinda, P., Pincus, L., Torell, E., & Kolbila, R. (2022). Adapting the WEAI to explore gender equity among Fishers, Processors, and sellers at Zambia's Lake Bangweulu. *World Development*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105821>
- Ruriana, A. P., Fahadayna, A. C., & Tawakkal, G. T. I. (2023). Political Parties and Women's Representation in the Indonesian Parliament 2009-2019. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(2), 234–251. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i2.45916>
- Sarwono. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Suhardi. (2015). Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Jurnal Nusantara*, 02(4), 73–83.

<https://doi.org/https://doi.org/10.29407/nor.v2i1.79>

